



Ringkasan Eksekutif

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2019



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
1. Pendahuluan	1
2. Profil Kabupaten Pekalongan	3
3. Analisis Dpsir Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	4
4. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	21
5. Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	22
6. Penutup	25



DAFTAR TABEL

Tabel Analisis DPSIR Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Tata Guna Lahan	4
Tabel Analisis Dpsir DPSIR Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Kualitas Air	10
Tabel Analisis DPSIR Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Kualitas Udara	13
Tabel Analisis DPSIR Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Resiko Bencana	17



Ringkasan Eksekutif
Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2019

1 **Pendahuluan**

Pemanfaatan lingkungan hidup tersebut akan mengakibatkan perubahan besar terhadap kualitas komponen alam seperti menurunnya kualitas air, udara, tanah dan keanekaragaman hayati, sehingga alam tidak mampu mengembalikannya pada keadaan semula atau memerlukan waktu yang lama untuk memulihkannya. Banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan tersebut mulai dari faktor alamiah seperti bencana alam, tetapi sumber utama dari penyebab kerusakan tersebut umumnya adalah manusia itu sendiri.

Demikian halnya di Kabupaten Pekalongan, isu-isu tentang penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, pertambangan, persampahan, dan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan beberapa isu lingkungan yang harus diperhatikan secara signifikan, agar daya tampung dan daya dukung lingkungan tetap terjaga sesuai peruntukannya.

Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang sangat pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, kurangnya etika dan perilaku yang tidak berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan, sehingga eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya terhadap pada aspek fisik tetapi juga mengarah pada lingkungan sosial budaya seperti kemiskinan dan kepunahan nilai-nilai



budaya masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup, baik penyebab dan dampak permasalahannya, maupun respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu pelaporan lingkungan menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memantau kualitas dan alat untuk menjamin perlindungan kehidupan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah sesuai yang diamanatkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mulai tahun 2016 pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Atas dasar uraian tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pendekatan metode DPSIR (Driving Force - Pressure - State - Impact- Response) sesuai dengan Pedoman Nirwasita Tantra yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan kebijakan program peningkatan lingkungan hidup dalam mewujudkan green, clean & clear.



2 Profil Kabupaten Pekalongan

A Luas dan Batas Wilayah Administrasi

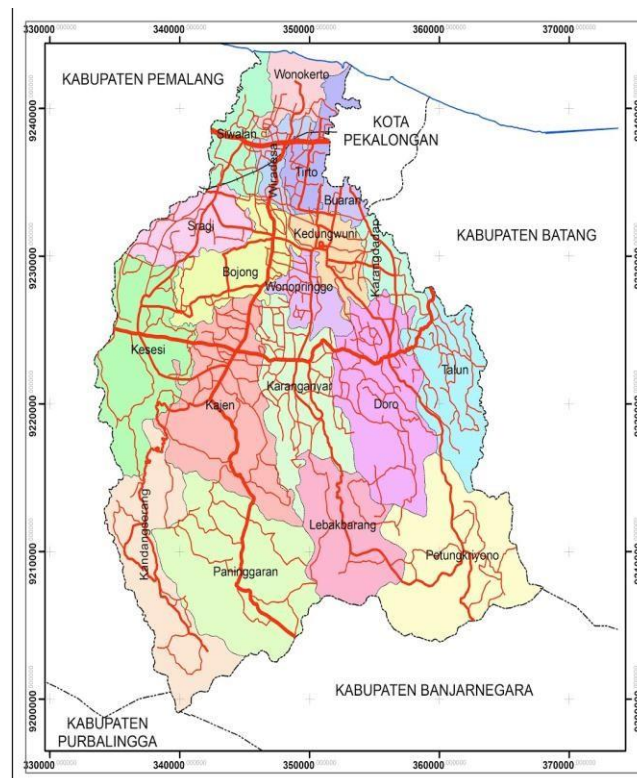
Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah otonom yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah dengan luas 836,15 Km² terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/ kelurahan. Menurut topografi desa, terdapat 66 desa/ keluraha yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 219 desa/kelurahan berada di dataran rendah. Secara geografis Kabupaten Pekalongan terletak diantara 6⁰- 70 23' LS dan antara 1090 – 1090 78' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa, Kota Pekalongan

Sebelah Timur : Kota Pekalongan dan Kabupaten

Batang Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Pematang





3 Analisis Dpsir Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Tabel Analisis Dpsir Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Tata Guna Lahan

No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
1	Alih fungsi Lahan	a. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 adalah 886.197 jiwa, mengalami peningkatan dari tahun	a. Kebutuhan akan lahan permukiman dan industri/jasa meningkat. b. Tata guna lahan konservasi berubah menjadi kawasan permukiman dan industri/jasa. c. Penegakan ijin bangunan/lingkungan masih lemah d. Tingginya harga tanah diperkotaan mendorong pemilik	a. Berkurangnya lahan konservasi/RTH Berdasarkan data perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada tahun (2016 - 2018), penggunaan lahan untuk perumahan cenderung meningkat, dari 11.907 ha pada tahun 2016 meningkat menjadi 12.028 ha pada	a. Bencana lingkungan (banjir, longsor, kekeringan) b. Tata Ruang tidak sesuai rencana (semrawut) c. Dampak sosial dan kenyamanan	a. Rehabilitasi lahan dengan cara melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi. Jumlah pohon yang ditanam untuk kegiatan penghijauan tahun 2018 sebanyak 102.800 pohon. Dan jumlah pohon yang ditanam untuk kegiatan reboisasi sebanyak 4500



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
		<p>2015 sebesar 439.809 jiwa dan pada Tahun 2016 sebesar 880.092 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,69%. (lampiran – tabel 48)</p> <p>b. Preferensi penduduk dilahan bukan untuk hunian/lahan konservasi</p>	<p>lahan untuk usaha</p>	<p>tahun 2018. Selain kebutuhan lahan untuk permukiman, kebutuhan lahan untuk industri juga meningkat. Yaitu 99 ha pada tahun 2016 menjadi 101 ha pada tahun 2018. (Lampiran - Tabel 13)</p> <p>Sedangkan penggunaan lahan pertanian dalam 5 tahun terakhir Terjadi trend Penurunan dari luasan 24.871 ha Pada tahun 2013 menjadi 23.875 ha</p>		<p>pohon. (lampiran - tabel 16)</p> <p>b. Regulasi terkait pengelolaan dan pengendalian pembangunan Salah satunya dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sehingga diharapkan tidak mengganggu ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan.</p> <p>c. Penegakan hukum lingkungan dan bangunan strategi</p>



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
		<p>c. Pertumbuhan ekonomi meningkat</p> <p>d. Pembanguna tidak sesuai dengan tata guna lahan yang meningkat</p>		<p>pada tahun 2018. Terjadi penurunan sebesar 996 ha atau 4 % selama 5 tahun.</p> <p>(gambar 2.10)</p> <p>b. Lahan kritis Luasan lahan kritis pada tahun 2018 adalah 1082,68 ha. Kondisi ini meningkat dari tahun 2017 yang hanya 593 ha. (lampiran - tabel 6).</p> <p>c. Kebencanaan (banjir, longsor). Jumlah kejadian Bencana banjir pada tahun 2018 di</p>		<p>yang ditempuh untuk mengupayakan pengendalian dan peningkatan pemulihan lingkungan hidup antara lain dengan melakukan peningkatan pengawasan lingkungan di wilayah tambang, meningkatkan hasil indeks tutupan Lahan dan meningkatkan pengawasan hutan lindung. Untuk mewujudkan</p>



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
				<p>Kabupaten Pekalongan ada 8 Kejadian di 5 kecamatan yaitu (Kec Bojong, Kandangserang, Pa ninggaran, Siwalan, dan Wonokerto). Sedangkan untuk bencana longsor ada 26 kejadian yang terjadi pada 8 kecamatan.</p> <p>(lampiran – tabel 44)</p> <p>d. Eksploitasi kawasan konservasi menjadi usaha/wisata. Terdapat 11 usaha wisata alam yang</p>		<p>strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan merumuskan beberapa program yaitu:</p> <p>(1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan,</p> <p>(2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA),</p> <p>(3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.</p> <p>d. Penerapan insentif dan disinsentif</p>



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
				ada di Kabupaten Pekalongan (lampiran - tabel 21) , hal ini dapat dimungkinkan untuk terjadi peningkatan mengingat prospek wisata alam yang semakin baik, jika tidak dikendalikan dan pemanfaatannya tidak memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan maka akan memicu terjadinya		pembangunan e. Sosialisasi tata guna lahan kepada masyarakat f. Revitalisasi kawasan permukiman padat menjadi vertikal g. Kemitraandengan pelaku pembangunan (instrumen ekonomi lingkungan)



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
				kerusakan lingkungan. e. Kegiatan pembangunan melampaui DDTLH		



Tabel Analisis Dpsir Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Kualitas Air

No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
1	Pencemaran Air (penurunan kualitas dan kuantitas air)	<ul style="list-style-type: none"> a. Laju pertumbuhan penduduk tinggi (lampiran – tabel 48) b. Peningkatan kebutuhan permukiman dan kegiatan usaha c. Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal d. Kemiskinan dan kawasan kumuh yang masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pencemaran air permukaan dan air tanah b. Kesadaran terhadap sanitasi dan kebersihan masih rendah, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan (lampiran tabel 32) dan tingkat kemiskinan (lampiran table 34) mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap lingkungan. c. Pelaku usaha belum taat dalam pengelolaan air tanah dan limbah. d. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki tempat BAB sendiri sebanyak 45.609 KK dan masih menggunakan sungai sebagai tempat BAB. (lampiran tabel 31) e. Perubahan tata guna 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Indeks Kualitas air. Hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan dan perhitungan status cemar dengan parameter DO, BOD, Fecal Coliform dan Total Coliform. (lampiran - Tabel 29) b. Kuantitas air sungai musim kemarau minim 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air b. Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat (lampiran – tabel 33) c. Tingginya biaya pengelolaan sungai d. Terganggunya proses self purification sungai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan monitoring kualitas air sungai secara berkala dan berkesinambungan b. Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilaksanakan oleh Disperkim LH Kabupaten Pekalongan terhadap industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah. c. Mewajibkan kegiatan industri/penghasil limbah cair agar memiliki izin pembuangan limbah cair d. Mewajibkan industri/kegiatan usahayang menghasilkan air limbah untuk



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
			lahan (gambar 2.10 dan 2.12) dan lampiran – tabel 13 e. Perubahan fungsi sungai			e. membuat IPAL Optimalisasi pengeoperasian IPAL bagi industri/ kegiatan usaha yang membuang air imbah ke badan air/sungai f. Sosialisasi pupuk yang ramah lingkungan bagi petani g. Mewajibkan industri/ kegiatan usaha menyampaikan pelaporan dokumen lingkungan kepada DisperkimLH dalam rangka pengendalian pencemaran air h. Meningkatkan kegiatan penghijauan untuk mengurangi erosi lahan sehingga sedimen yang masuk ke sungai berkurang i. Normalisasi sungai dan secara rutin j. Kegiatan rehabilitasi DAS



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
						k. Pembangunan sesuai tata ruang m. Penertiban perijinan Penegakan hukum lingkungan n. Peningkatan program sanitasi o. Peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah



Tabel Analisis Dpsir Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Kualitas Udara

No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
1	-	a) Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, industri dan rumah tangga meningkat b) Kegiatan pembangunan yang melampaui intensitas bangunan sehingga persentase	a. Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari Kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak, dimana jumlah kendaraan Bermotor di Kabupaten Pekalongan cenderung	a. Berdasarkan hasil uji laboratorium, didapatkan bahwa kualitas udara ambien di lokasi padat lalu lintas, permukiman, perkantoran, dan industry memenuhi baku mutu (BM yang dipersyaratkan (Tabel-37)).	a. Menurunnya kualitas udara b. Menurunnya tingkat kesehatan dan kenyamanan masyarakat c. Menurunnya estetika kota d. Efek gas rumah kaca	a. Memperbanyak pohon penghijauan di kanan kiri jalan. b. Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi menyerap polutan udara. c. Sosialisasi penggalakkan pemakaian bahan bakar ramah lingkungan. d. <i>Kegiatan Car Free Day</i> setiap hari minggu <i>dan Car Free Night</i> .



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
		<p>RTH berkurang</p> <p>c) Banyaknya kegiatan pembangunan yang tidak mengikuti ketentuan green building</p>	<p>meningkat.</p> <p>Pada tahun 2018 jumlah, sepeda Motor sebanyak 198.057 unit, mobil penumpang sebanyak 13.889 unit, mobil bus sebanyak 928 unit , mobil barang sebanyak 6746 unit dan kendaraan khusus sebanyak 72 unit. (tabel 39).</p> <p>b. Infrastruktur jalan yang tetap (Tabel-40).</p> <p>c. Meningkatnya kendaraan akan</p>			<p>e. Pemantauan rutin kualitas udara ambien di sekitar lokasi permukiman, perkantoran, padat lalu lintas, dan industri.</p> <p>f. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala.</p> <p>g. Pembinaan kegiatan/usaha industri berkaitan dengan alat pengendali pencemaran udara (PPU) sesuai dengan polutan udara yang dihasilkan.</p>



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
			<p>meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi GRK juga cenderung meningkat</p> <p>Masih banyak alat pengendali pencemaran udara (PPU) sumber tidak bergerak yang belum memenuhi persyaratan pada kegiatan/ usaha. Misalnya cerobong kurang tinggi tanpa dilengkapi alat sampling, dust</p>			<p>Penhijauan di sekitar lokasi industri dengan karakteristik daun yang menyerap polutan.</p> <p>h. Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilakukan DisperkimLH terhadap industri/kegiatan usaha yang menghasilkan emisi gas buang.</p> <p>i. Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan Dokumen Lingkungan</p>



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
			<p>Collector kurang optimal, dll.</p> <p>Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor.</p> <p>Penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar menimbulkan asap dan debu berlebihan.</p> <p>g. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, berfungsi menyerap polutan udara kendaraan bermotor disekitar kawasan kota.</p>			<p>kepada DisperkimLH dalam rangka pengendalian pencemaran udara.</p> <p>f. Penghijauan dan reboisasi</p>



Tabel Analisis Dpsir Isu Prioritas Lingkungan Hidup Aspek Resiko Bencana

No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
1	<p>a. Peningkatan resiko banjir, longsor, dan kekeringan.</p> <p>b. Peningkatan banjir rob dan intrusi air laut akibat penurunan muka air tanah</p>	<p>a. Laju pertambahan penduduk tinggi</p> <p>b. Peningkatan kebutuhan permukiman dan kegiatan usaha</p>	<p>a. Berkurangnya tutupan lahan . Berdasarkan data perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada tahun (2016 - 2018), penggunaan lahan untuk perumahan cenderung meningkat, dari 11.907 ha pada tahun 2016 meningkat menjadi 12.028 ha pada tahun 2018. Selain</p>	<p>a. Intensitas kejadian bencana (longsor, banjir, rob dll). Kejadian bencana selama tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan dapat Dirinci sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. banjir = 5 kasus 2. longsor = 8 kasus 3. rob = 3 kasus 4. kekeringan = 4 kasus. <p>Rincian kejadian masing-masing bencana dilihat</p>	<p>a. Kawasan/ permukiman kumuh</p> <p>b. Wabah penyakit</p> <p>c. Berkurangnya vegetasi di kawasan pantai seperti misalnya hilangnya tutupan mangrove sebagai sabuk pantai (lampiran– tabel 10)</p> <p>d. Semakin meningkatnya luas genangan</p>	<p>a. Pembangunan sesuai tata ruang</p> <p>b. Penertiban perijinan khususnya pengambilan air tanah</p> <p>c. Penegakan hukum lingkungan</p> <p>d. Pemberian edukasi masyarakat mengenai tindakan mitigasi bencana</p> <p>e. Pembangunan tanggul di sekitar kawasan pesisir untuk menanggulangi</p>



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
			kebutuhan Lahan untuk permukiman, kebutuhan lahan untuk industri juga meningkat. Yaitu 99 ha pada tahun 2016 menjadi 101 ha pada tahun 2018. (Tabel 13) Sedangkan penggunaan lahan pertanian dalam 5 tahun terakhir terjadi trend penurunan dari luasan 24.871 ha pada tahun 2013 menjadi 23.875 ha	dalam lampiran tabel 44 – 47	rob; e. Penurunan muka tanah akibat penggunaan sumber air tanah di kawasan pesisir; f. Abrasi dan sedimentasi yang kerap terjadi di wilayah pesisir. g. Menurunnya kesehatan dan kenyamanan Masyarakat h. Menimbulkan kerugian baik materi maupun korban jiwa	bencana rob f. Melakukan gerakan penghijauan dan reboisasi sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana banjir.



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
			<p>pada tahun 2018. Terjadi penurunan sebesar 996 ha atau 4 % selama 5 tahun.</p> <p>b. Alih fungsi lahan Perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan luasan tutupan lahan berkurang, serta pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan sehingga berpotensi</p>		<p>Mengurangi estetika kota</p> <p>i. Mengurangi estetika kota</p>	



No	Isu Prioritas	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
			mengakibatkan kerusakan lingkungan			



3 Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Dalam penentuan isu prioritas penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan pertimbangan kriteria yang tertuang dalam Pedoman Nirmasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah:

- a) Kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati;
- b) Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan
- c) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Dalam penyusunan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan langkah – langkah :

1. Melakukan diskusi dengan pihak terkait.
2. Melakukan analisa dan mengambil data sekunder baik data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dll.

Hasil dari proses tersebut menjadi isu prioritas lingkungan hidup daerah Kab Pekalongan yaitu :

1. Perubahan Fungsi Lahan / Alih Fungsi Lahan

Isu – isu terkait dengan tema isu perubahan fungsi lahan, antara lain adalah :

- Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi lahan yang ditetapkan

2. Pencemaran Air

Isu – isu terkait dengan tema isu pencemaran air, antara lain adalah :



- Penurunan kualitas dan kuantitas air bersih akibat pencemaran oleh limbah pabrik/industri maupun limbah domestik

3. Degradasi Kawasan Pesisir

Isu – isu terkait dengan tema isu perubahan fungsi lahan, antara lain adalah :

- Peningkatan resiko banjir, longsor, dan kekeringan akibat berkurangnya daerah resapan air hujan dan alih fungsi lahan
- Peningkatan banjir rob dan intrusi air laut akibat penurunan muka air tanah
- Kurangnya kesadaran masyarakat terkait penggunaan/eksplotasi air bawah tanah yang berlebihan

4. Pengelolaan Persampahan

- Kurangnya kesadaran masyarakat terkait penggunaan plastik dan pengelolaan sampah yang diawali dari rumah tangga sebagai sumber timbulan sampah

4 Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

A. Inovasi Perbaikan Kualitas Lingkungan

1. Kegiatan sosialisasi pengendalian pencemaran air
2. Pembangunan IPLT berlokasi di Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa
3. Mewajibkan industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah ke badan air agar memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
4. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. Pengawasan pemulihan lingkungan bekas tambang.



6. Pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
7. Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang
8. Pembangunan tanggul penahan air rob
9. Kegiatan BERJUMPA (Bersih Jumat Pagi)

B. Inovasi Perubahan Iklim

1. Program Kampung Iklim di Desa Sinangoh Prendeng Kecamatan Kajen
2. Gerakan Penghijauan Taman Kota
3. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
4. Adaptasi dan mitigasi bencana.

C. Inovasi Perbaikan Kualitas Sumber Daya Alam

1. Kegiatan pelestarian satwa endemik yaitu Owa Jawa dan Elang Jawa yang ada di Kabupaten Pekalongan
2. Pemanfaatan lahan pekarangan dan sungai/kali.
3. Rehabilitasi lahan kritis.
5. Kearifan lokal pelestarian lingkungan.
6. Gerakan penghijauan dan reboisasi

D. Inovasi Perbaikan Tata Kelola Lingkungan

1. Kegiatan Bank Sampah (Kabupaten Pekalongan mempunyai Bank Sampah sebanyak 33 unit).
2. Kegiatan Pengurangan Sampah Plastik
 - ❖ Pembuatan Ecobrik.
 - ❖ Pembuatan Paving dengan campuran bahan dari sampah plastik.
3. Kegiatan TPS 3R (Kabupaten Pekalongan terdapat 45 unit yang tersebar di kecamatan.
4. Program Adiwiyata.
 - ❖ Penerima penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2018



yaitu SMP 01 Bojong dan SMA 1 Sragi

❖ Penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2018

yaitu SMP 2 Kajen

5. Kegiatan Car Free Day (setiap minggu pagi) di Alun Alun.
6. Penghijauan kanan kiri jalan.
7. Kegiatan Bersih Pantai
Kegiatan inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat juga dilaksanakan di kawasan pesisir dalam rangka hari bersih sampah nasional (HPSN). Kegiatan bersih pantai bertajuk "*Coastal Clean Up*" di laksanakan di Pantai Wonokerto dengan melibatkan unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan Desa Wonokerto.
8. Gerakan Kebersihan di sarana publik
Dilakukan dalam rangka pengenalan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat ditempuh dengan menggunakan berbagai media diantaranya Sosialisasi Mobil Hijau,
9. Kampanye Lingkungan
Dilakukan pd tgl 23 Februari 2018 oleh HAKLI, ASOBSI dan Karang Taruna yaitu dengan melakukan pembagian tas kantong plastik oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan serta gerakan pungut sampah bersama di Alun-alun Kajen
10. Gerakan Cabut Paku
Merupakan gerakan yang dilakukan dengan mencabut paku yang ada di pohon-pohon, biasanya digunakan untuk menempel selebaran iklan/kertas. Tujuannya mengembalikan fungsi pohon sebagaimana mestinya sehingga tidak mengganggu estetika kota.



5 Penutup

A. Kesimpulan

Isu prioritas utama terkait lingkungan hidup daerah yang dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah (OPD, LSM, dll) Kabupaten Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Alih Fungsi Lahan ;
- b. Pencemaran Air ;
- c. Degradasi Kawasan Pesisir ;
- d. Pengelolaan Persampahan

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan.
2. Berupaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai di dalam RPJMD.
3. Memperhatikan status dan kualitas lingkungan dalam pengambilan kebijakan.
4. Merencanakan pembangunan dengan berwawasan lingkungan.
5. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berhubungan dengan pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian pencemaran air, penanggulangan degradasi kawasan pesisir, dan pengelolaan persampahan
6. Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.
7. Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup,



kapasitas dan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup.

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan saksi terhadap perusak dan pencemar lingkungan hidup.
10. Peningkatan peran serta pihak swasta dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.